

Sistem Informasi Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa

Putu Dinda Gunawan¹

Animah²

Isnawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondences: animahmtr@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dimaksudkan mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas di desa Batuyang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif. Informan yang terlibat yaitu Kepala Desa Batuyang, Bendahara Desa Batuyang, Sekertaris Desa Batuyang, Camat Pringgabaya, Ketua BPD Desa Batuyang, dengan jumlah informan lima orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini terkait dengan penerapan sistem informasi keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas di Desa Batuyang sudah efektif dan membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa Batuyang baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator yang telah dipenuhi oleh pemerintah desa Batuyang yakni kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur laporan, feedback (umpan balik). Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah Desa Batuyang dalam penerapan sistem informasi keuangan desa.

Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan; Akuntabilitas; Pemerintah Desa; Parameter Pengukuran Efektivitas.

Financial Information System in Improving Village Accountability

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of financial information system in increasing accountability in Batuyang village. This research is a descriptive type of research. The informants involved were the Head of Batuyang Village, Treasurer of Batuyang Village, Secretary of Batuyang Village, Head of Pringgabaya Sub-district, Head of BPD Batuyang Village, with a total of five informants. Data was collected by using interview, documentation and observation techniques. The results of this study are related to the implementation of a financial information system in increasing accountability in Batuyang Village which has been effective and helps in increasing the accountability of the Batuyang village government both vertically and horizontally. This can be seen from the five indicators that have been fulfilled by the Batuyang village government, namely the suitability of the information requested in the template/program, the suitability of the type of report, the accuracy and certainty of reporting time, the conformity of the requirements and reporting procedures, and feedback. The implications of this research can be taken into consideration for decision making by the Batuyang Village government in the application of the village financial information system.

Keywords: Financial Information System; Accountability; Village Government; Effectiveness Measurement Parameters.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 7
Denpasar, 26 Juli 2022
Hal. 1878-1892

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i07.p16

PENGUTIPAN:
Gunawan, P. D., Animah,
Isnawati. (2022). Sistem
Informasi Keuangan Dalam
Meningkatkan Akuntabilitas
Desa. *E-Jurnal Akuntansi*,
32(7), 1878-1892

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
24 Mei 2022
Artikel Diterima:
25 Juli 2022

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja sektor publik saat ini mendapat banyak kritik dari masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas pada sektor publik harus dapat dikelola dengan baik. Sektor publik bertujuan untuk mengukur kinerjanya. Untuk mengukur kinerja dari organisasi sektor publik tidak bisa diukur dari jumlah keuntungan melainkan akuntabilitas. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Hadi, 2020:3). Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk pemerintahan yang baik dan sebagai kontrol yang demokratis. Akuntabilitas biasanya hanya diperiksa di unit penelitian kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau di suatu negara. Masih sedikit penelitian yang membahas tentang model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Basuki *et al.*, 2019). Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui tanggung jawabnya. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan kepada masyarakat karena organisasi pemerintah merupakan lembaga yang berorientasi pada masyarakat (Mawardi, 2021).

Hal ini didukung oleh Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Nomor 7 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain itu kewajiban pelaksanaan akuntabilitas pada pemerintahan desa juga digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan gambaran bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa.

Penggunaan akuntabilitas diharapkan mampu memahami secara mendalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa telah mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa (Kusumaningrum *et al.*, 2021).

Suatu organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil (Budiasni & Ayuni, 2020). Suatu organisasi pemerintahan dapat dikatakan akuntabel ketika memiliki Kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Kendala-kendala yang terjadi pada pemerintahan desa terkait bagaimana dalam meningkatkan akuntabilitas membuat pemerintah pusat sadar akan permasalahan yang terjadi pada pemerintahan desa terutama dalam tata kelola keuangan desa yang dinilai masih sangat rendah. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menanggapi dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, berdasarkan prinsip bahwa semua pengelolaan keuangan desa kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hariyanti *et al.*, 2021). Hal ini dimulai dengan amanat presiden susilo bambang yudhoyono di akhir masa jabatannya untuk membentuk pemerintahan baru yaitu pemerintahan desa, karena undang-undang tersebut disahkan setiap desa memiliki hak untuk mendapat perhatian lebih untuk berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah. hal ini dimaksudkan agar otonomi daerah masing-masing desa dapat meningkat dan pemerintah desa bersama masyarakat desa lebih kreatif dalam memajukan daerahnya masing-masing. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, Presiden Joko Widodo memasukkan rencana ini dalam nawacita pembangunan Indonesia dari pinggiran. Selain itu juga diatur dalam PP No.8 Tahun 2016 yang secara teknis membahas tentang dana Desa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengajak BPKP dan akademisi untuk mempermudah kerja perangkat desa dalam menggunakan secara bijak dan melaporkan secara benar dana desa yang telah diterima. salah satunya dengan adanya sistem keuangan desa (siskeudes) yang dapat mempermudah aparatur desa (Rosnidaha *et al.*, 2021).

Pengelolaan dana desa yang tidak sedikit dalam kegiatan pemerintahan yang terus meningkat setiap tahunnya membuat aparat desa sebagai aparat pengelola harus c. Pemerintah desa memerlukan suatu sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, meliputi informasi posisi keuangan desa, kondisi kinerja keuangan desa, dan akuntabilitas desa. Sistem informasi teknologi ini disebut Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). BPKP dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Organisasi Keuangan Daerah telah menetapkan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai kegiatan untuk mendukung tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik yakni transparan dan akuntabilitas (Gamayuni, 2020).

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *stewardship theory* dimana teori ini mendefinisikan situasi disaat *steward* (pemerintah) tidak mementingkan kepentingan pribadi dan lebih mementingkan kepentingan *principal* (masyarakat) dalam (Müller, 2016). Menurut Fat sistem suatu himpunan suatu benda nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, beketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan (*unity*) untuk menncapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Menurut Jogianto yang dikemukakan dalam buku "Sistem Informasi Akuntansi" Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatau tujuan teretentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi serta Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data, data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata (Hutahaean, 2014)

Fungsi utama dari sebuah informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan yang lebih tepat, selain itu informasi

juga memberikan standar, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan. Dalam hal ini laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang dihasilkan dimana tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan (Dewi *et al.*, 2021).

Salah satu terobosan dalam peningkatan pelayanan informasi bagi pemerintah desa adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, yang berguna untuk mendukung transparansi sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga pengawasan pembangunan desa akan lebih jelas dan tepat sasaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan penguatan kualitas pelayanan publik desa menjadi lebih baik (Paper & Hertati, 2020). Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, Kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar laporan-laporan tertentu yang dibutuhkan. Sedangkan sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pihak yang terkait dengan perusahaan dimana fungsi dan manfaat yang diberikan oleh Siskeudes sama dengan yang diberikan oleh sistem informasi akuntansi (AIS). Siskeudes dan AIS dapat dipertukarkan sehingga semua teori yang akan dibangun didasarkan pada konsep AIS (Indriani *et al.*, 2020).

Prinsip Akuntabilitas adalah dimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan, kebijakan apa yang diambil bahkan hingga laporan apa yang dilaporkan baik secara administratif maupun politik. Aspek Akuntabilitas memungkinkan masyarakat dapat menilai apakah penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah berhasil atau tidak (Bolang, 2014). Berdasarkan asas dalam pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas, maka dalam pengelolaan alokasi Dana Desa memerlukan akuntabilitas yaitu proses pengelolaan alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, akuntabilitas yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Dewi *et al.*, 2021).

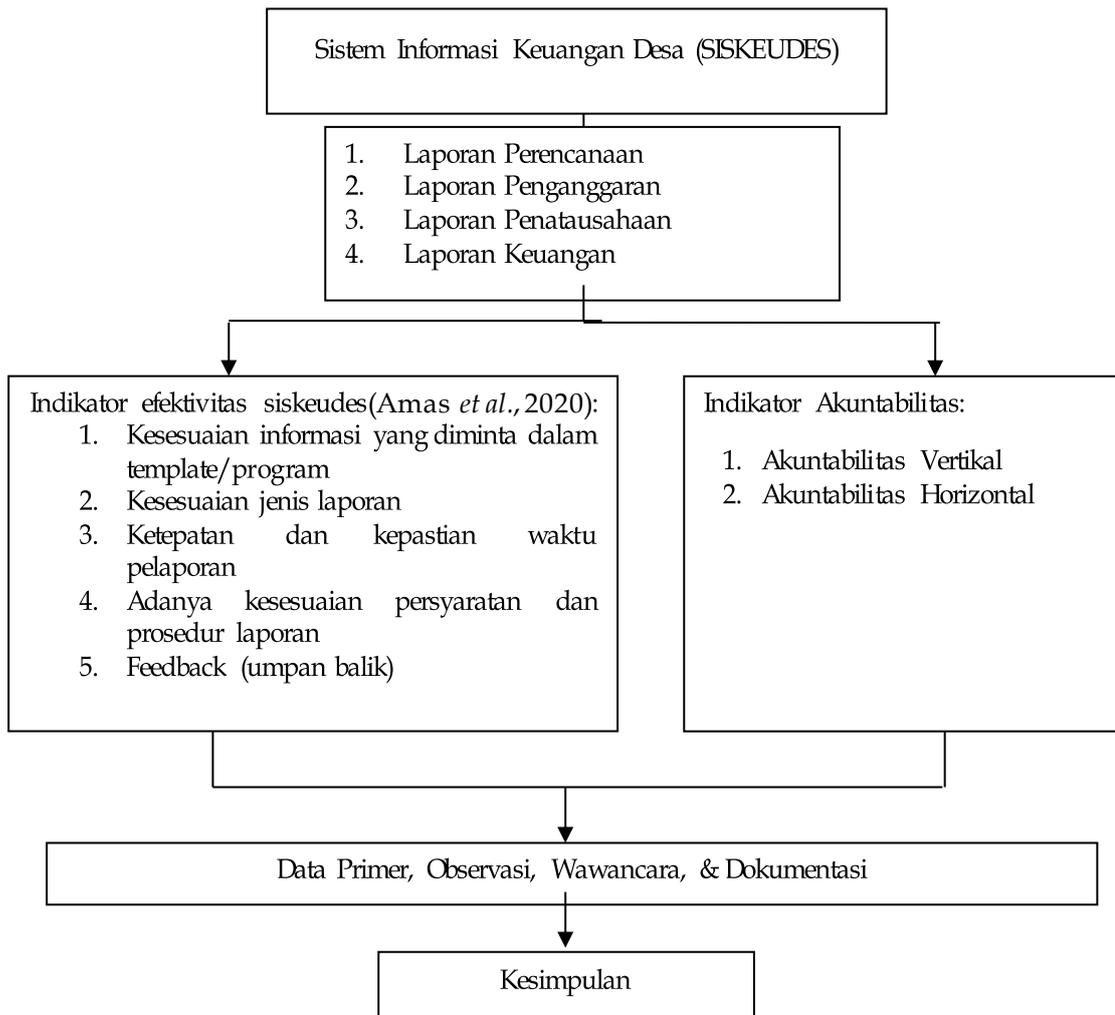
Penelitian dengan judul *"Factors Affecting Accountability Of Village Fund Management Through Implementation Of The Village Financial System (SISKEUDES)"* yang dilakukan oleh Icuk Rangga Bawono pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terdiri dari peran dan kompetensi perangkat desa, implementasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, dengan menyebarkan kuesioner kepada sekertaris desa dan kepala urusan keuangan desa sebagai responden yang tersebar di 182 desa di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan sistem keuangan desa secara parsial signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Bawono *et al.*, 2020).

Penelitian ini dilakukan oleh Bill Pangayow pada tahun 2021 dengan judul *"Planning, Accountability and reporting of Village Financial Management in Indonesia"*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh proses pengelolaan keuangan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap akuntabilitas yang

merupakan unsur *good governance*. Dengan sampel penelitian 78 petugas di empat desa di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel keuangan dan proses manajemen (perencanaan, menerapkan dan pelaporan) tentang pertanggungjawaban (Pangayow & Patma, 2021).

Masalah pelaporan pertanggungjawaban yang ada pada pemerintahan desa menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat dikarenakan sebelumnya pelaporan pertanggungjawaban masing-masing desa memiliki bentuk yang berbeda beda, sehingga penetapan standar dan penerapan sistem informasi keuangan harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai salah satu perwujudan sistem informasi keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas disetiap desa sehingga pemerintah pusat dapat mengontrol secara langsung bagaimana tata kelola keuangan disetiap desa. Aplikasi SISKEUDES ini telah diberlakukan untuk seluruh Indonesia mulai tahun 2016, penerapan dan pengaplikasian aplikasi ini disertai dengan diadakannya sosialisasi-sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para bendahara desa, begitu juga dengan Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur salah satu desa yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Desa Batuyang merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SISKEUDES dengan harapan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dari Desa Batuyang, baik akuntabilitas yang diwajibkan terhadap pemerintahan kabupaten atau kota hingga pemerintah pusat, maupun masyarakat sipil. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ada pada pemerintah desa membantu pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa, jika tata kelola keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik lalu bagaimana pemerintah desa dapat memberikan data yang transparan dan akuntabel. Data yang Akuntabel dan juga transparan menjadi tuntutan dari pemerintah pusat dan juga masyarakat bagi pemerintah desa sehingga bagaimana penerapan sistem informasi keuangan yang ada pada desa menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi keuangan Desa Batuyang dalam meningkatkan akuntabilitas desa apakah sudah akuntabel atau tidak.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yakni gambaran terhadap suatu keadaan yang bersifat faktual dan akurat. Penelitian deskriptif ini ditujukan untuk memecahkan masalah ataupun untuk mengumpulkan informasi yang disusun dan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan lima instrumen penelitian yakni; Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/ program, kesesuaian jenis laporan yang dibuat sesuai dengan ketentuan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur pelaporan serta, *feedback* (umpan balik) (Amas et al., 2020).

Informan yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui, memahami dan memiliki akses terhadap aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan juga terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian

kualitatif. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa di kecamatan Pringgabaya yang sudah menerapkan sistem informasi keuangan berupa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa.: (1) pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan (3) pewawancara selalu bertanya (4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide (Hardani, 2015). Dalam wawancara pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai Bapak Maswardi S.Ap selaku Kaur Keuangan Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Bapak Rusdi Zain selaku Kepala Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Bapak Mashuri,S.Pd selaku Sekretaris Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif biasanya diuraikan menjadi *credibility, transferability, dependability, confirmability*. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan melakukan *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah (Hardani, 2015).

Prinsip dalam fenomenologi; Pertama, prinsip yang berdasarkan pada sumber-sumber intuition dan insight, yang tidak dapat digeneralisasi. Dalam ranah ini tugas peneliti melakukan investigasi deskriptif berkaitan dengan fenomena *consciousness* (kesadaran) antara yang obyektif dan subjektif atau kesadaran itu sendiri, seperti bentuk kesadaran atas apa yang dilihat dalam yang berhubungan dengan deskripsi mitos organisasi, budaya, dan symbol symbol (Fikri Ali *et al.*, 2010).

Kedua, pendekatan fenomenologi dilakukan dengan *tribal language phenomenology*, yang meliputi *intentionality* (kesadaran), *epoche* (prosedur), *eidosis* (ide atau bentuk), *eidic reduction* (esensi atau hakikat), *noesis* (pemahaman subjektif), *noema* (objek yang dipersepsikan), dan *apodictic* (intuisi murni tanpa tercampur akal).Ketiga, sebagai implikasi dari prinsip pertama dan kedua, maka metode riset yang dilakukan adalah metode kualitatif. Dimulai dari pengujian pengalaman kesadaran individual (*phenomena*), kemudian dilakukan analisis, *how meanings develop in the continuing restructuring process of the consciousness*, dan berakhir pada, *the individual's critical reviewing of experience*. Singkatnya, fenomenologi sebenarnya merupakan pertemuan antara kejadian dan kesadaran. Alat utama penelitian fenomenologi adalah intuisi dan refleksi yang subjektif atas hasil analisis intensional dari subjek yang dilakukan dengan proses *epoche* dengan menyertakan ekstensi atau proses pemahaman, yaitu dengan memerhatikan makna halhal yang bersifat subjektif dibalik apa yang terlihat. Secara singkat, langkah yang perlu dilakukan dalam metode fenomenologi adalah sebagai berikut; *intentional analysis, epoche, dan eidetic reduction*.

Phenomenology mempertimbangkan pemahaman makna kehidupan keseharian manusia (*life world*) untuk mengungkap masalah sosial dan menginterpretasikan bagaimana orang bertindak dalam kehidupan

keseharian. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mengamati fenomena keseharian di lapangan menggunakan metode fenomenologi untuk melihat praktik akuntabilitas antara organisasi dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan sistem informasi keuangan yang bersifat komputerisasi pada tata kelola keuangan pemerintah desa menuntut adanya ketepatan informasi yang diperlukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh template/program. Seperti penggunaan sistem keuangan desa pada Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya agar tidak menyalahi aturan dan memudahkan para pengguna yang akan membaca laporan keuangan desa secara online data yang diinput dalam aplikasi haruslah sesuai dan dapat dijamin kebenarannya.

Seperti yang dikatakan Bapak Maswardi dalam wawancara *“ya sebelum input saya buat dulu manualnya, dari data manual itu ketika saya sedang input saya centang akun yang sudah-sudah agar tidak salah, karena kan sekali kita input angkanya di SISKEUDES itu langsung disemua akun yang ada hubungannya itu ke isi dia”* (Maswardi, S. Ap, Bendahara Desa Batuyang, Selasa 15 februari 2022, 09:00 WITA).

Sistem informasi keuangan berbasis komputer dan secara online merupakan tuntutan ditengah perkembangan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa. Penggunaan media elektronik menurut (BPKP, 2007). bertujuan membantu pihak pengelola keuangan Desa untuk dapat mengelola keuangan Desa secara baik, efektif dan efisien, baik dalam hal pengimputan, pengolahan data yang terkait, dan penyampaian laporan keuangan Desa. Penggunaan media online dalam pengelolaan keuangan Desa memerlukan dukungan *electronic fillingsystem* yang memadai

Untuk memperoleh jenis laporan yang sesuai dengan yang dibutuhkan operator SISKEUDES harus menginput secara bertahap terlebih dahulu seperti data umum, jenis kegiatan/program, anggaran, barulah ke informasi pendapatan dan belanja. Sebelum dilakukannya penginputan dilakukannya pengelolaan data secara manual terlebih dahulu seperti misalnya APBDes terdapat beberapa APBDes perubahan barulah dilakukan penginputan pada aplikasi SISKEUDES. Menurut Kepala Desa dan Bendahara Desa Batuyang penggunaan aplikasi ini sangat membantu untuk mempercepat pengadaaan pelaporan keuangan yang dibutuhkan seperti yang mereka sampaikan pada wawancara, menurut Bapak Rusdi Zain selaku Kepala Desa Batuyang *“saya kan disini sebagai kepala desa pengganti ya dan sudah hampir setahun, sejak saya masuk memang sudah menggunakan SISKEUDES itu dan Alhamdulillahnya yang saya tau kami tidak pernah mendapatkan teguran dalam pengumpulan laporan-laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab kami, itu kan tandanya laporan keuangan kami lebih berkualitas”* (Rusdi Zain, Kepala Desa Batuyang, Senin 21 februari 2022, 10:00 WITA). Sedangkan Bapak Maswardi mengatakan *“memang benar kami melakukan dulu pembuatan-pembuatan data manual seperti APBDes itu sampe ada beberapa APBDes perubahan, nanti bisa dilihat APBDes perubahan yang terakhir itu yang kami input ke aplikasi, kalok berbicara tentang kualitas laporan keuangan, ya pastinya ada peningkatan karena seperti yang saya katakan ya kalok kita input akunnnya sekali nanti dilain lain itu langsung ke isi jadi tinggal ikutin formnya saja dan hasilnya langsung jadi selain jadi lebih cepat juga bisa*

meminimalisir kesalahan dalam penginputan angka-angka dalam laporan keuangan kami” (Maswardi,S.Ap, Bendahara Desa Batuyang, Selasa 15 februari 2022, 10:00 WITA).

Pelaksanaan tiap tahap pelaporan keuangan desa tentunya dituntut harus bisa diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Keseluruhan tahap pelaporan yang dilakukan dalam pemerintah desa berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan baik mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan laporan keuangan desa (BPKP, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan juga observasi pada pemerintah desa Batuyang terkait dengan kepastian dan ketepatan waktu dalam tahapan tata kelola keuangan desa, pemerintah desa Batuyang sering kali mengalami keterlambatan dikarenakan adanya proses berkelanjutan dalam tata kelola keuangan desa sehingga apabila pada salah satu proses mengalami keterlambatan maka akan berpengaruh pada proses-proses selanjutnya. Namun keberadaan dari aplikasi SISKEUDES ini dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah desa baik dari segi estimasi terkait ketepatan dan kepastian dari waktu laporan yang ditentukan maupun ketepatan isi dari laporan yang dibutuhkan para pengguna.

Dalam prosedur tatakelola keuangan desa yang sudah menerapkan SISKEUDES secara keseluruhan dijelaskan oleh BPKP Pusat pada pedoman siskeudes 2.0 (BPKP, 2018), Pemenuhan persyaratan dalam pelaporan untuk menjamin bahwa laporan yang dibuat tidak bertentangan dengan standard aturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti pernyataan dari bendahara desa “ya pastinya, kami harus mengikuti proses langkah-langkah dan tahapan pengelolaannya, untuk mastiin tidak ada kesalahan saat penginputan jadi pencairan dana bisa pas, karena itu yang sudah di cantumkan di pedoman aplikasinya ya kita ikutin aja” (Maswardi,S.Ap, Bendahara Desa Batuyang, Selasa 15 februari 2022, 10:00 WITA). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Batuyang telah melakukan penginputan pada SISKEUDES sesuai dengan prosedur untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaporan keuangan, sehingga pelaksanaan tata kelola keuangan desa dapat berjalan secara tepat waktu dan akuntabel.

Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tahapan yang ada pada pedoman SISKEUDES 2,0 yang tercantum pada menu data entri yang dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari menu perencanaan, menu penganggaran, menu penatausahaan, menu pembukuan.

Setiap laporan yang menjadi output dari aplikasi SISKEUDES yang digunakan dalam tata kelola keuangan di Desa Batuyang laporan yang dibuat harus dilakukan evaluasi dan dikoreksi mengenai ketepatan dari laporan tersebut dan kesesuaian dengan fakta yang terjadi, ketepatan waktu pelaporan dan konsistensi laporan dengan apa yang diminta oleh sistem. Proses umpan balik ini dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas PMD selaku pembina pengelolaan keuangan Desa, Dinas Pengelolah Keuangan dan Ased Daerah

(DPKAD), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat kabupaten, paraauditor (BPKP, BPK) dan stake holder lainnya di Kabupaten Lombok Timur (Amas *et al.*, 2020). Berikut wawancara dengan sekretaris desa Batuyang Bapak Mashuri *"Hal yang paling sering menjadi umpan balik kami dari pemerintah kabupaten yakni terkait keterlambatan pelaporan ya biasanya, walaupun hitungannya jarang tapi pasti pernah, karena kan jikalau ada yang terlambat dalam salah satu pelaporan bisa menghambat kegiatan yang lain yang selanjutnya begitu"* (Mashuri, S.Pd, Sekertaris Desa Batuyang, Selasa 21 februari 2022, 10:00 WITA). Informasi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan adanya umpan balik dari pihak terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pelaporan keuangan Desa Batuyang.

Kantor desa Batuyang merupakan salah satu kantor desa yang telah menerapkan sistem keuangan desa (SISKEUDES) sebagai sistem informasi keuangannya sejak tahun 2019. Sejak penetapan dan pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangun untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diarahkan untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dengan adanya tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem keuangan desa (SISKEUDES). Pelatihan yang telah diikuti oleh bendahara desa selaku operator SISKEUDES di kantor desa Batuyang yakni bapak Maswardi, S.Ap sehingga penerapan SISKEUDES pada pemerintah desa Batuyang dapat terlaksana. Penerapan SISKEUDES pada pemerintah desa Batuyang dapat berjalan dengan baik juga didukung oleh beberapa faktor.

Kebutuhan akan jaringan internet sudah tidak bisa dipungkiri, hampir semua pihak berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi, hampir seluruh lembaga mulai mengubah sistem yang dilakukan secara manual menjadi sistem yang terkomputerisasi salah satunya adalah pencatatan data keuangan. Untuk menciptakan ini semua haruslah didukung dengan ketersediaan internet/jaringan dimana internet merupakan sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia. Pada pemerintah desa Batuyang ketersediaan jaringan internet sudah memadai dengan adanya WIFI yang tersedia di kantor desa Batuyang, ini sangat mendukung penerapan dari aplikasi SISKEUDES tersebut.

Keberadaan dari data dan informasi baik yang akan diinput ke dalam aplikasi ataupun data dan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SISKEUDES. Data dan informasi yang perlu disiapkan sebelum dilakukan penginputan pada aplikasi siskeudes pada pemerintah desa Batuyang seperti data-data transaksi, sampai dengan data seperti APBDes perubahan yang masih dibuat secara manual terlebih dahulu, sedangkan data dan informasi yang dihasilkan oleh aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan para pihak pengguna.

Sistem ini akan dapat berjalan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pengadaan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Sumber Daya Manusia pada pemerintah desa Batuyang cenderung cukup kompeten dimana terbukti dengan telah berjalannya penerapan aplikasi SISKEUDES ini sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, serta hasil laporan keuangan yang dihasilkan pun cukup berkualitas.

Pengawasan yang bersifat audit yang menjadi tugas dari pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintah desa. Pembinaan juga diperlukan dalam penerapan aplikasi ini dikarenakan mengingat pentingnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada pemerintah desa, sehingga untuk memperkenalkan aplikasi ini diperlukan adanya pembinaan-pembinaan bagi para operator SISKEUDES. Operator SISKEUDES desa Batuyang sendiri yakni Bapak Maswardi, S.Ap telah mengikuti pembinaan SISKEUDES ini sudah sekitar 6 kali dan juga terdapat groupchat khusus operator SISKEUDES Lombok Timur guna membahas beberapa perkembangan ataupun hal-hal terkait dengan SISKEUDES itu sendiri.

"saya sudah sering sekali ikut pelatihan SISKEUDES ini mungkin sekitar enam kali ya di Selong, kita juga tetap terhubung ini ada Groupchatnya di WA khusus operator SISKEUDES se-Lombok Timur jadi kalau ada apa apa yang kita tidak mengerti bisa ditanyakan disana" (Maswardi, S.Ap, Bendahara Desa Batuyang, Selasa 15 februari 2022, 09:00 WITA)

Pemerintah desa Batuyang telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dari terlaksananya penerapan sistem informasi keuangan desa yakni penggunaan aplikasi SISKEUDES. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusdi Zain selaku Kepala Desa Batuyang *"ya pasti si kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk mengikuti perkembangan jaman, sekarang kan sudah apa apa pakek laptop, disini saja sudah ada 6 laptop di pelayanan, kasi pemerintahan ada dua, operator desa, sekdes, sama di pak mas. Belum lagi pemasangan wifi karena kan sekarang semuanya online kayak siskeudes, di pelayanan juga, tapi untungnya SDM kita udah bisa mengikuti kayak pak Mas kan sering ngajar-ngajarin Bendahara Desa lain juga buat siskeudes itu"* (Rusdi Zain, Kepala Desa Batuyang, Senin 21 februari 2022, 10:00 WITA).

Pertanggungjawaban pada pemerintah desa Batuyang kepada Pemerintah Kecamatan Pringgabaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan juga kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi pemerintah desa Batuyang melakukan pelaporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dalam pelaporan perencanaan pemerintah desa Batuyang akan menyerahkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) waktu untuk proses perencanaan ini dilakukan mulai dari bulan oktober sampai dengan desember. Bapak Mashuri, S.Pd mengatakan *"proses penyusunan dari RKP-Desa ini saya yang susun, tapi nanti tentu saya koordinasikan dengan kepala desa, lalu dilakukan musyawarah dengan BPD barulah kita serahkan ke pemkab untuk dievaluasi kalau dari kami itu biasanya september sudah menyerahkan"* (Mashuri, S.Pd, Sekertaris Desa Bauyang, Selasa 21 februari 2022, 10:00 WITA).

Bapak Maswardi, S. Ap turut memberikan keterangan dimana setelah dilakukannya evaluasi oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur barulah hasil yang telah disetujui yang akan diinput ke SISKEUDES. *“saya tinggal tunggu rencana kerja yang sudah disetujui oleh pemkab itu yang saya masukkan ke SISKEUDESS rencana kerja yang sudah valid”* (Maswardi, S. Ap, Bendahara Desa Batuyang, Selasa 15 februari 2022, 10:00 WITA).

Bentuk dari pelaporan dari laporan pelaksanaan ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ini biasanya dilaporkan pada akhir tahun anggaran karena penyusunan laporan ini dilakukan selama satu tahun anggaran. Penatausahaan, bentuk dari pelaporan penatausahaan Buku kas, Buku PB Bank, Buku PB Pajak. Untuk pelaporan dalam penatausahaan ini langsung dilakukan di aplikasi SISKEUDES, ini dilakukan pada tanggal 10 bulan berjalan. Pelaporan, laporan yang dihasilkan dari proses pelaporan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini biasa disampaikan pada minggu kedua pada bulan Juli, lalu disampaikan ke pemerintah kabupaten yang akan dipublikasikan pada laporan konsolidasi pemerintah kabupaten Lombok Timur. Pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban ini melampirkan hampir seluruh laporan keuangan yang telah dibuat. Proses ini dilakukan biasanya pada akhir tahun anggaran atau pada bulan maret tahun selanjutnya.

Akuntabilitas Horizontal, Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mahsun, 2013). Dimana pada pemerintahan desa Batuyang dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan keterangan masyarakat yang diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Batuyang. Bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada BPD selaku perwakilan masyarakat Desa Batuyang yakni dalam bentuk LKPPD (Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang biasanya disampaikan pada bulan maret tahun berikutnya dalam musyawarah bersama BPD.

Berikut adalah hasil penelitian bagaimana penerapan sistem keuangan desa Batuyang.

Tabel 1. Penerapan Sistem Keuangan Desa

No	Instrument	Diterapkan	
		Terlaksana	Belum Terlaksana
1.	Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program	√	
2.	Kesesuaian jenis laporan	√	
3.	Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan		√
4.	Adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur laporan	√	
5.	Feedback (umpan balik)	√	
Persentase indikator yang terlaksana			80%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Penerapan sistem informasi keuangan pada Desa Batuyang dalam bentuk sistem keuangan desa (SISKEUDES) telah terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan indikator-indikator yang ada yakni; Kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, Penerapan sistem keuangan di Desa Batuyang

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dilakukan sesuai dengan format template yang tersedia, agar tidak menyalahi aturan dan memudahkan bagi pembaca serta pihak lain untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa secara online.

Jenis laporan yang dibuat sesuai dengan ketentuan, operator siskeudes telah memasukan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan yang bersumber dari pembukuan manual, misalnya data Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Buku Kas Umum, Buku bantu bank, Buku bantu kas pajak belanja, bukti pengeluaran dll, sehingga pada saat pemeriksaan mengenai pelaksanaan kegiatan, tidak ada kesalahan akibat perbedaan antara data yang diinput dengan data manual serta sesuai yang diharapkan dalam format yang tersedia. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pelaporan.

Ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, Penyampaian laporan keuangan desa perlu memperhatikan ketepatan waktu agar tidak terjadiketerlambatan dalam proses berikutnya. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Bendahara Desa sehingga beliau selalu memaksimalkan agar tidak ada proses yang terlambat karena satu proses yang terlambat maka akan mempengaruhi proses selanjutnya khususnya dalam pelapran dan pencairan dana tahap berikutnya.

Adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur pelaporan, Pemenuhan persyaratan dalam pelaporan untuk menjamin bahwa laporan yang dibuat tidak bertentangan dengan standard aturan pengelolaan keuangan Desa yang telah ditetapkan pemerintah. Dimana pemerintah desa di Desa Batuyang telah melakukan penginputan laporan ke aplikasi SISKEUDES secara benar dalam rangka meminimalisir kesalahan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan normal serta pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat, cepat dan akuntabel.

Feedback (umpan balik), Setiap laporan yang dibuat harus dilakukan evaluasi dan dikoreksi mengenai akurasi, kesesuaian dengan fakta yang terjadi, ketepatan waktu pelaporan serta konsistensi laporan dengan apayang diminta oleh sistem. Proses umpan balik ini dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini pihak pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Pengaplikasian sistem pengelolaan keuangan berbasis komputer secara online merupakan tuntutan ditengah perkembangan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas yang ada pada pemerintah desa Batuyang sudah sangat baik baik jika dilihat dari akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal. Dimana dapat dilihat dengan ketepatan waktu pelaporan kepada BPD selaku perwakilan rakyat dalam bentuk LKPPD dan juga adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) di Pemerintahan Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sudah efektif, hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan lima paramater yaitu; kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, jenis laporan yang dibuat sesuai dengan ketentuan,

ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, adanya kesesuaian persyaratan dan prosedur pelaporan serta, *Feedback* (umpan balik). Namun satu parameter yang sering menjadi masalah adalah keterlambatan waktu pelaporan yang berimplikasi pada keterlambatan proses selanjutnya. Dengan adanya penerapan sistem informasi keuangan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah desa Batuyang baik secara vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun horizontal yakni akuntabilitas kepada masyarakat luas.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kesulitan dalam menemui narasumber dan terbatasnya waktu wawancara, mengingat kesibukan dari para informan, dan juga operator SISKEUDES Desa Batuyang yang sempat mengalami sakit kurang lebih selama kurang lebih 3 bulan membuat terbatasnya waktu wawancara. Dengan terdapatnya keterbatasan dari penelitian ini, saran berikut dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya yakni; diharapkan dapat memilih lokasi penelitian dengan narasumber yang dapat ramah dalam meluangkan waktunya bagi peneliti untuk melakukan wawancara, dan peneliti selanjutnya dapat mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada narasumber mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

REFERENSI

- Aini Kusumaningrum, F. N., Djamhuri, A., & Purwanti, L. (2021). Accountability in village financial management in Kludan Village. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(3), 419–423. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1093>
- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). *Effectiveness Of Village Financial System Application For Village Governments In Financial Reporting In Kolaka District*. 11(2), 232–242.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan . (2007). *Akuntabilitas instansi pemerintah*. Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2018). *Pedoman Siskeudes 3*. Jakarta .
- Basuki, A. F., Setyowati, K., & Wahyunengseh, R. D. (2019). Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggunharjo Village Budget. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10312>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bolang, J. (2014). "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." II(9), 634.
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of "Pada Gelahang" Enhancing Village Financial

- Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.28416>
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>
- Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G., & Purnomosidhi, B. (2010). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 417–428. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.12.7101>
- Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*.
- Hardani, H. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April)*. Pustaka ilmu.
- Hariyanti, T. P., Rusiyanto, R., Dewi, R. S., (2021). the Effect of Transparency and Accountability of Village Fund Financial Management in Creating Good Governance. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 2368–2386.
- Hutahaean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi - Google Books*. Yogyakarta:Deepublish.
- Indriani, M., Nadirsyah, Fuadi, R., & Evayani. (2020). Can Siskeudes support village governance in Aceh Province of Indonesia? *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1743617>
- Kalorbobir, Y. M., Siregar, B., & Badrudin, R. (2021). The Effect of Village Financial System Applications on Village Financial Management Accountability with Organizational Commitment as Mediating. *Ijisrt.Com*, 6(11).
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F., (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mawardi, M. C. (2021). *Effectiveness Of Implementation of Village Financial System Applications (SISKEUDES) in Improving Accountability and Transparency of Financial Statements Grati Village Sub-District Summersuko Lumajang District*. 5, 137–143.
- Müller, R. (2016). *Governance and governmentality for projects : enablers, practices, and consequences*. 256.
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Paper, C., & Hertati, D. (2020). *Accountability of Village Financial Management and Community Participation in The Development of Web-Based Village Government Information System in Sidoarjo East Java District*. 2019, 216–224. <https://doi.org/10.11594/nstp.2019.0430>
- Rika Gamayuni, R. (2020). Accounting information technology and village finance management in Indonesia. *Journal of Administrative and Business Studies*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.20474/jabs-6.1.1>
- Rosnidaha, I., Muna, A., Michael, A., & Fariani, N. (2021). Improving Accountability of Village Funds through Village Financial Management Based on Government Accounting Standard. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–6.